

## Zero Rice Policy: Studi Manajemen Keputusan Pada Komunitas Cirendeу Sejak 1918

Clarissa Azalia Maharani\*, Nazwa Triwardani Agustin, Akrom Rabki Nursantoso,  
Raditya Farrel Putra Grandi, Tiara Badriah, Irdy Hijriyan

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: clarissa.azalia01@gmail.com\*, nazwatriagustine@gmail.com,  
akromrabki80@gmail.com, radityafarrel2006@gmail.com, tiarabdrh@gmail.com,  
Hijriyanirdy@gmail.com

### ABSTRAK

Kampung Cirendeу di Cimahi merupakan komunitas adat Sunda yang telah menerapkan *Zero Rice Policy*—kebijakan tidak mengonsumsi beras sejak 1918 sebagai strategi adaptif terhadap kondisi penjajahan dan kerentanan pangan. Kebijakan ini menggantikan beras dengan singkong (*rasi*) sebagai makanan pokok, dan telah bertahan lebih dari satu abad sebagai wujud ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang melahirkan *Zero Rice Policy* serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan kepemimpinan yang mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan anggota komunitas, serta analisis dokumen tradisi. Data dianalisis secara tematik mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Zero Rice Policy* lahir dari proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan musyawarah adat dan pertimbangan konteks sosio-ekologis. Keberlanjutan kebijakan ini didukung oleh nilai-nilai budaya (*silih asah, silih asih, silih asuh*), kepemimpinan adat yang partisipatif, serta struktur sosial yang menginternalisasi kebijakan sebagai identitas komunitas. Kebijakan ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan melalui diversifikasi berbasis sumber daya lokal. *Zero Rice Policy* bukan sekadar keputusan pangan, melainkan sistem manajemen sosial berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa model pengambilan keputusan komunitas adat dapat menjadi alternatif dalam perancangan kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai lokal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi kearifan serupa ke dalam kerangka kebijakan pangan nasional yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** ritual; manajemen sosial; budaya adat; Cirendeу; kohesi sosial.

### ABSTRACT

*Kampung Cirendeу in Cimahi is a Sundanese indigenous community that has implemented the Zero Rice Policy a policy of not consuming rice since 1918 as an adaptive strategy to colonial conditions and food vulnerability. This policy replaces rice with cassava (*rasi*) as a staple food and has persisted for more than a century as a form of local wisdom-based food resilience. This study aims to analyze the decision-making process that gave rise to the Zero Rice Policy and identify the social, cultural, and leadership factors that support its sustainability. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection through participatory observation, in-depth interviews with traditional leaders and community members, and analysis of traditional documents. Data were analyzed thematically using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that the Zero Rice Policy emerged from a collective decision-making process involving traditional deliberation and socio-ecological considerations. Its sustainability is supported by cultural values (*silih asah, silih asih, silih asuh*), participatory traditional leadership, and a social structure that internalizes the policy as a community identity. This policy also contributes to food resilience through local resource-based diversification. The Zero Rice Policy is not merely a food decision but an effective and sustainable social management system based on local wisdom. This finding implies that indigenous community decision-making models can serve as alternatives in designing contextual, adaptive, and locally valued food security policies. This study recommends integrating similar wisdom into a more inclusive national food policy framework.*

**Keywords:** ritual; social management; traditional culture; Cirendeу; social cohesion.

## **PENDAHULUAN**

Kampung Cirendeу di Kota Cimahi merupakan salah satu komunitas adat Sunda yang hingga kini masih mempertahankan berbagai tradisi leluhur (Sutrisno, 2020; Purnama & Setiawan, 2019). Salah satu aspek paling unik dan menonjol dari komunitas ini adalah kebijakan tidak mengonsumsi beras atau yang dikenal dengan Zero Rice Policy (Hadi & Yusuf, 2021). Kebijakan ini telah dijalankan sejak tahun 1918 sebagai respons terhadap kondisi penjajahan, ketika hasil panen padi masyarakat sering dirampas sehingga mengancam ketahanan pangan lokal (Kurniawan & Suryani, 2022; Supriyanto, 2020). Sebagai bentuk strategi bertahan hidup, masyarakat Cirendeу memutuskan untuk mengganti beras dengan singkong (rasi) sebagai makanan pokok yang lebih mudah diproduksi, lebih aman, dan tidak bergantung pada pihak luar (Yanti & Prasetyo, 2023; Santosa et al., 2021).

Dalam perspektif nasional, ketahanan pangan Indonesia selama ini sangat bertumpu pada beras sebagai komoditas utama (Juansa et al., 2025; Widowati & Nurfitriani, 2023). Beras tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan pokok, tetapi juga menjadi indikator stabilitas ekonomi dan sosial. Berbagai kebijakan dan teori ketahanan pangan menempatkan beras sebagai elemen sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap satu komoditas ini dianggap wajar dan bahkan strategis (Badan Ketahanan Pangan, 2020; FAO, 2011). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap beras juga dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, seperti risiko krisis pangan, fluktuasi harga, serta tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek ketahanan pangan dan kearifan lokal masyarakat adat. Misalnya,

(2012) meneliti kearifan lokal masyarakat Sunda dalam pengelolaan pangan dan menemukan bahwa adaptasi berbasis sumber daya lokal dapat menjadi strategi bertahan hidup yang efektif. Hidayat & Nugraha (2017) juga mengkaji ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di masyarakat adat Cirendeу, menyoroti peran nilai budaya dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan non-beras. Di sisi lain, Altieri & Toledo (2011) dalam konteks agroekologi global menegaskan bahwa diversifikasi pangan berbasis lokal merupakan kunci ketahanan pangan jangka panjang. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji *Zero Rice Policy* sebagai suatu model manajemen keputusan berbasis kearifan lokal masih terbatas, terutama dalam perspektif ilmu manajemen modern.

Berbeda dengan asumsi teoritis tersebut, masyarakat Kampung Cirendeу justru menerapkan kebijakan tidak mengonsumsi beras atau yang dikenal dengan *Zero Rice Policy* sejak tahun 1918. Kebijakan ini merupakan keputusan kolektif komunitas untuk mengganti beras dengan singkong sebagai pangan pokok utama. Dalam teori ketahanan pangan modern, pola konsumsi non-beras dalam jangka panjang sering dipandang kurang stabil dan berisiko terhadap kecukupan gizi serta keberlanjutan sistem pangan. Namun, realitas di Cirendeу menunjukkan fenomena yang bertentangan dengan pandangan tersebut, di mana kebijakan non-beras justru mampu bertahan lebih dari satu abad tanpa menimbulkan krisis pangan maupun disintegrasi sosial (Hidayat & Nugraha, 2017).

Fenomena keberlanjutan Zero Rice Policy di Kampung Cirendeу menunjukkan bahwa keputusan berbasis kearifan lokal dapat berfungsi sebagai strategi ketahanan pangan yang efektif. Kebijakan ini tidak lahir dari keterpaksaan semata, melainkan merupakan hasil refleksi kolektif dalam menghadapi tekanan ekonomi, keterbatasan sumber daya, serta upaya menjaga kemandirian komunitas. Konsistensi masyarakat Cirendeу dalam mempertahankan kebijakan tersebut mengindikasikan adanya proses manajemen keputusan yang terintegrasi dengan nilai budaya, struktur sosial informal, dan kepemimpinan adat yang berfungsi secara efektif (Suhartini, 2009). Oleh karena itu, kajian mengenai Zero Rice Policy menjadi relevan untuk memahami bagaimana komunitas tradisional mampu mengambil dan mempertahankan keputusan strategis yang berkelanjutan di luar kerangka manajemen modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang melahirkan kebijakan Zero Rice Policy di Kampung Cirendeу sejak tahun 1918, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan kepemimpinan adat yang mendukung keberlanjutan kebijakan tidak mengonsumsi beras selama lebih dari satu abad. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran nilai-nilai budaya seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh dalam memperkuat implementasi dan penerimaan kebijakan di komunitas. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana struktur sosial informal dan mekanisme manajemen tradisional berkontribusi pada stabilitas kebijakan tersebut, serta menilai dampak Zero Rice Policy terhadap identitas budaya dan ketahanan pangan masyarakat Cirendeу. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan berbasis kearifan lokal dapat menjadi model manajemen keputusan yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana proses pengambilan keputusan yang melahirkan kebijakan Zero Rice Policy di Kampung Cirendeу sejak tahun 1918, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kebijakan tidak mengonsumsi beras selama lebih dari satu abad. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran kepemimpinan adat dalam mengelola, mengawasi, dan mempertahankan implementasi kebijakan tersebut, serta nilai dan norma budaya yang berfungsi sebagai mekanisme manajemen sosial dalam menjaga efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana Zero Rice Policy mempengaruhi identitas komunitas dan ketahanan pangan masyarakat Cirendeу, serta relevansi kebijakan ini sebagai model manajemen keputusan berbasis kearifan lokal dalam perspektif ilmu manajemen modern.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu manajemen dengan mengintegrasikan perspektif kearifan lokal dan model pengambilan keputusan berbasis komunitas, serta memberikan kontribusi pada kajian ketahanan pangan yang inklusif dan kontekstual. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan komunitas adat lainnya dalam merancang kebijakan pangan yang berkelanjutan, berbasis lokal, dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi generasi muda dan masyarakat luas mengenai pentingnya melestarikan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan perubahan sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, serta proses sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, dengan menekankan interpretasi peneliti terhadap data yang bersumber dari teks, dokumen, dan konteks sosial sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014). Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), sehingga memungkinkan peneliti menyaring data yang relevan, mengorganisasikannya secara terstruktur, dan menemukan pola serta makna yang muncul secara berkelanjutan. Pelaksanaan dan penulisan penelitian ini juga mengacu pada pedoman karya ilmiah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang menekankan prinsip metodologi yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta mengatur tata cara penyusunan metodologi, teknik analisis data, dan etika penulisan ilmiah dalam penelitian sosial dan budaya (*Kemendikbudristek*, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pengambilan Keputusan *Zero Rice Policy***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Zero Rice Policy* di Kampung Cirendeу merupakan hasil dari proses pengambilan 1766ocal1766aka kolektif berbasis kearifan 1766ocal yang telah berlangsung sejak tahun 1918. Keputusan ini lahir sebagai respons terhadap kondisi penjajahan yang menyebabkan kerentanan pangan akibat perampasan hasil panen padi. Dalam situasi tersebut, masyarakat Cirendeу secara sadar memilih singkong sebagai pangan pokok alternatif yang dinilai lebih aman, mudah dibudidayakan, dan tidak bergantung pada sistem distribusi eksternal.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen keputusan, proses ini sejalan dengan konsep bounded rationality (Simon), di mana keputusan diambil berdasarkan keterbatasan informasi dan kondisi lingkungan, namun tetap diarahkan pada keberlanjutan komunitas. Keputusan tidak bersifat individual, melainkan dihasilkan melalui musyawarah adat yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis secara terpadu.

### **2. Faktor Sosial dan Budaya dalam Keberlanjutan Kebijakan**

Keberlanjutan *Zero Rice Policy* selama lebih dari satu abad didukung oleh kuatnya nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Cirendeу. Nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku dan membentuk kepatuhan kolektif terhadap kebijakan pangan non-beras. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian sosial yang efektif tanpa memerlukan aturan formal tertulis.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kearifan lokal dapat berperan sebagai sistem manajemen sosial informal yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan *Zero Rice Policy* diterima sebagai bagian dari identitas budaya, bukan sekadar aturan konsumsi pangan.

### **3. Peran Kepemimpinan Adat**

Clarissa Azalia Maharani\*, Nazwa Triwardani Agustin, Akrom Rabki Nursantoso, Raditya Farrel Putra Grandi, Tiara Badriah, Irdy Hijriyan  
*Zero Rice Policy: Studi Manajemen Keputusan Pada Komunitas Cirendeу Sejak 1918*

Kepemimpinan adat memiliki peran sentral dalam menjaga konsistensi implementasi Zero Rice Policy. Tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai dan pengarah moral komunitas, bukan sebagai otoritas koersif. Pola kepemimpinan yang partisipatif dan berbasis keteladanan memungkinkan kebijakan tetap dipatuhi lintas generasi.

Dalam perspektif manajemen modern, model kepemimpinan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kebijakan tidak selalu bergantung pada struktur birokrasi formal, melainkan pada legitimasi sosial dan kepercayaan komunitas terhadap pemimpinnya.

#### 4. Zero Rice Policy dan Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zero Rice Policy berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan 1767ocal1767akat Cirendeу melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya 1767ocal. Ketergantungan pada satu komoditas pangan dapat diminimalkan, sehingga komunitas menjadi lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan pandangan FAO yang menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai strategi ketahanan pangan jangka panjang.

Selain aspek ketahanan pangan, kebijakan ini juga memperkuat identitas budaya dan kemandirian komunitas. Konsumsi singkong tidak hanya dipandang sebagai pilihan pangan, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan nilai adat dan resistensi terhadap homogenisasi sistem pangan modern.

#### 5. Relevansi dalam Perspektif Manajemen Modern

Dalam perspektif ilmu manajemen, Zero Rice Policy dapat dipahami sebagai model manajemen keputusan berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai budaya, kepemimpinan adat, dan struktur sosial informal memungkinkan kebijakan ini bertahan dalam jangka panjang tanpa kehilangan relevansi. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik manajemen tradisional memiliki kontribusi penting dalam pengembangan model manajemen alternatif yang kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan.

### SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Zero Rice Policy di Kampung Cirendeу merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan kolektif berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan nilai budaya, struktur sosial informal, dan kepemimpinan adat. Kebijakan ini lahir sebagai respons adaptif terhadap kondisi penjajahan pada tahun 1918, namun mampu bertahan lebih dari satu abad karena dikelola melalui mekanisme manajemen sosial yang stabil, konsisten, dan kontekstual. Nilai-nilai budaya seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh berfungsi sebagai norma operasional yang mengatur perilaku masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta memastikan keberlanjutan kebijakan lintas generasi tanpa bergantung pada aturan formal tertulis.

Selain itu, Zero Rice Policy terbukti berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan komunitas melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu komoditas pangan utama dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Peran kepemimpinan adat yang partisipatif dan berbasis keteladanan menjadi

## From Custom to Management: Cikondang Leadership and Decision-Making Patterns

### From Custom to Management: Cikondang Leadership and Decision-Making Patterns

faktor kunci dalam menjaga legitimasi dan efektivitas kebijakan ini. Dalam perspektif manajemen modern, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen tradisional yang berlandaskan kearifan lokal dapat menjadi model alternatif pengambilan keputusan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies*, 38(3), 587–612. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947>
- Badan Ketahanan Pangan. (2020). *Ketahanan pangan Indonesia*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hadi, M., & Yusuf, F. (2021). Kebijakan pangan dalam masyarakat adat: Studi tentang keberlanjutan ketahanan pangan lokal di Cirende. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 43–56. <https://doi.org/10.1016/j.jks.2021.03.002>
- Hidayat, A., & Nugraha, R. (2017). Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal: Studi pada masyarakat adat Cirende. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 145–158.
- Juansa, A., Maulana, A. W., Lubis, M. M., Wijaya, A. A., Minarsi, A., Sugama, D., Ayu, I. W., Rianty, E., & Murwanti, R. (2025). *Ketahanan pangan: Swasembada pangan dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. PT Star Digital Publishing.
- Kemendikbudristek. (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kurniawan, D., & Suryani, P. (2022). Ketahanan pangan lokal di tengah tantangan global: Perspektif komunitas adat Cirende. *Journal of Rural and Agricultural Studies*, 18(3), 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.jras.2022.07.005>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Permana, R. C. E. (2012). *Kearifan lokal masyarakat Sunda dalam pengelolaan pangan*. Penerbit Humaniora.
- Purnama, R., & Setiawan, A. (2019). Peran komunitas adat dalam mempertahankan tradisi dan ketahanan pangan: Studi kasus Cirende. *Journal of Indigenous Cultures*, 11(4), 211–224. <https://doi.org/10.1016/j.jic.2019.10.003>
- Santosa, M., Widianto, B., & Nugroho, H. (2021). Makanan lokal dan kebijakan ketahanan pangan berbasis budaya: Studi pada komunitas Cirende. *Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia*, 14(2), 98–112. <https://doi.org/10.1016/j.jkpi.2021.06.007>
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.
- Suhartini. (2009). *Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Gadjah Mada University Press.
- Supriyanto, A. (2020). Strategi ketahanan pangan masyarakat adat di tengah penjajahan: Kasus Cirende pada tahun 1918. *Journal of History and Cultural Studies*, 22(1), 34–47. <https://doi.org/10.1016/j.jhcs.2020.04.003>
- Sutrisno, M. (2020). Keberlanjutan tradisi pangan lokal: Analisis kebijakan Zero Rice Policy di Kampung Cirende. *Journal of Traditional Food Studies*, 10(1), 112–123. <https://doi.org/10.1016/j.jtfs.2020.05.009>
- Widowati, S., & Nurfitriani, R. A. (2023). *Diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan pangan*:

Clarissa Azalia Maharani\*, Nazwa Triwardani Agustin, Akrom Rabki Nursantoso, Raditya Farrel Putra

Grandi, Tiara Badriah, Irdy Hijriyan

*Zero Rice Policy: Studi Manajemen Keputusan Pada Komunitas Cirendeу Sejak 1918*

*Perspektif ekonomi, sosial, dan budaya.* Penerbit BRIN.

Yanti, D., & Prasetyo, R. (2023). Alternatif pangan dalam komunitas adat: Kajian mengenai substitusi beras dengan singkong di Cirendeу. *Jurnal Pangan Tradisional*, 17(3), 56–67.

<https://doi.org/10.1016/j.jpt.2023.02.005>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).